

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN MASYARAKAT EKONOMI ASEAN DI INDONESIA¹

Oleh: Naomi Fhaskalina Sibuea²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia dan apa dampak Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Peraturan pelaksanaan masyarakat Ekonomi ASEAN dari sisi perdagangan dapat dilandaskan dengan Landasan Moral atau kemanusiaan sebagai dasar mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia . 2. Dampak yang mempengaruhi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia dilihat dari dua sisi yakni sisi positif dan sisi negatif. Dimana dampak positif tersebut dapat memberikan dampak kepada aspek perdagangan, aspek Investasi dan aspek ketenagakerjaan. Dan dampak disisi negatif juga dapat mempengaruhi Eksploitasi SDA di Negara Indonesia, bebasnya produk luas memasuki kawasan Negara Indonesia dan Masyarakat lebih kondusif dengan barang luar negeri

Kata kunci: asean; masyarakat ekonomi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN, meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing. Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan

kesejahteraan warga ASEAN.³ MEA diharapkan akan membawa ASEAN menuju pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global. Salah satu alasan pembentukan pasar tunggal tersebut adalah menjawab tantangan sehubungan dengan meningkatnya persaingan terutama di kawasan regional akibat bangkitnya Cina dan India. Pencapaian MEA menjadi pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dilakukan melalui lima pilar, yaitu: aliran bebas dari barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia?
2. Apa dampak Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *libraryresearch*.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean Di Indonesia

Peraturan pelaksanaan masyarakat ekonomi ASEAN dalam perspektif globalisasi perdagangan yaitu sistem Ekonomi Pancasila adalah “ Aturan main” kehidupan ekonomi atau hubungan-hubungan ekonomi antar pelaku-pelaku ekonomi yang didasarkan pada etika atau moral pancasila dengan tujuan akhir mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Etika pancasila adalah Landasan Moral dan kemanusiaan dan dijiwai semangat nasionalisme (kebangsaan) dan kerakyatan, yang kesemuanya bermuara pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Intisari Pancasila (Eka

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Anna S. Wahongan S.H, MH; Dr. Youla O. Aguw S.H, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101024

³ Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Keselamatan dan Keselamatan Kerja, Jakarta, Djambatan, 1995, hlm. 15.

³ Departemen Luar Negeri Republik Indonesia (DEPLU RI), ASEAN Selang Pandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta, 2010, hlm 2.

⁴ *Ibid* hlm.2

Sila) menurut Bung Karno adalah gotong royong atau kekeluargaan, sedangkan dari segi politik Trisila yang diperas dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (monotheisme), sosio-nasionalisme, dan sosio demokrasi.

Praktik-praktik liberalisasi perdagangan dan Investasi di Indonesia sejak Tahun delapan puluhan bersamaan dengan serangan globalisasi dari negara-negara Industri terhadap negara-negara berkembang, sebenarnya dapat ditangkal dengan penerapan sistem ekonomi Pancasila.

Namun sejauh ini gagal karena politik ekonomi diarahkan pada akselerasi pembangunan yang lebih mementingkan pertumbuhan ekonomi tinggi ketimbang hasilnya.

Pada era global, pemabangunan hukum ditandai dengan kecenderungan tuntutan kebutuhan pasar yang dewasa ini semakin mengglobal. Dalam kondisi semacam itu, produk-produk hukum yang dibentuk lebih banyak bertumpu pada keinginan pemerintah, karena tuntutan pasar.⁵

Peraturan pelaksanaan di Kawasan Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang saat ini sedang menjadi daya tarik tersendiri bagi dunia. Kawasan yang terdiri dari negara sebagian besar merupakan negara berkembang, dianggap sebagai kekuatan regional baru di dunia selayaknya Uni Eropa ke-20 silam. Kerjasama di kawasan ini berawal sejak deklarasi Bangkok disahkan pada Tahun 1967 yang ditandai dengan didirikannya ASEAN atau asosiasi bangsa-bangsa Asia Tenggara. Organisasi ini didirikan oleh lima negara yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.⁶

Dalam perjalannya, organisasi ini kemudian memiliki sepuluh dengan anggota berikutnya adalah Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, dan Laos pada KTT ASEAN yang bertepatan dengan 30 Tahun ASEAN di Kuala Lumpur pada Tahun 1997, dibentuk sebuah kesepakatan mengenai adanya ASEAN vision 2020. Pada KTT ASEAN di Tahun 2003 di Bali, dibentuklah *Declaration of ASEAN Concord II*.

⁵http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t!@file_Artikel_Abstrak/Isi_Artikel_258120024618

⁶ Menteri Kemendagri mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan tema "Menjadi pemenang pada masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Didalamnya, terdapat kesepakatan untuk membentuk ASEAN community atau komunitas sosio-kultural ASEAN, komunitas politik-keamanan ASEAN, dan komunitas Ekonomi ASEAN.

Terkait dengan ekonomi, diwujudkan dalam bentuk masyarakat ekonomi ASEAN (MEA). Tanggal 20 November 2007 disepakati piagam ASEAN dan menjadikan ASEAN organisasi berbadan hukum dengan fokus perhatian pada proses integrasi ekonomi menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

ASEAN sepakat mempercepat implementasi MEA dari Tahun 2020 menjadi 2015, untuk mewujudkan MEA 2015, dirumuskan AEC blueprint, yang membuat langkah-langkah strategis yang harus diambil setiap negara Anggota ASEAN mulai Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2015.⁷

MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN yang memiliki pola mengintegrasikan Ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem perdagangan bebas atau *Free Trade* antara negara-negara anggota ASEAN. Para anggota ASEAN termasuk Indonesia telah menyepakati suatu perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN tersebut. MEA adalah istilah yang hadir dalam Indonesia tapi pada dasarnya MEA itu sama aja dengan AEC atau ASEAN Economic Community.

Awal mulanya MEA berawal pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) yang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada Tanggal 1997 dimana para pemimpin ASEAN akhirnya memutuskan untuk melakukan perubahan ASEAN menjadi suatu kawasan makmur, stabil dan sangat bersaing dalam perkembangan Ekonomi yang berlaku adil dan dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan sosial Ekonomi (ASEAN vision 2020), kemudian dilanjutkan pada KTT Bali yang terjadi pada bulan Oktober pada Tahun 2003, para pemimpin ASEAN mengeluarkan pernyataan bahwa masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA akan menjadi sebuah tujuan dari perilaku integrasi Ekonomi regional di Tahun 2020, ASEAN security community dan beberapa komunitas sosial budaya ASEAN merupakan dua pilar yang tidak bisa terpisahkan ASEAN. Seluruh pihak diharapkan agar dapat sama secara kuat didalam membangun komunitas ASEAN di Tahun 2020. Kemudian,

⁷ *Ibid* hlm.18

selanjutnya pada pertemuan dengan Menteri Ekonomi ASEAN yang telah diselenggarakan dibulan Agustus 2006 yang ada dikuala Lumpur, Malaysia mulai bersepakat untuk bisa memajukan Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA dengan memiliki target yang jelas dan terjadwal dalam pelaksanaannya.⁸

Di KTT ASEAN yang ke-12 di bulan 2007, para pemimpin mulai menegaskan komitmen mereka tentang melakukan percepatan pembentukan komunitas ASEAN di Tahun 2015 yang telah diusulkan oleh ASEAN vision 2020 dan ASEAN concord II dan adanya penandatanganan deklarasi CEBU mengenai percepatan pembentukan komunitas Ekonomi ASEAN di Tahun 2015 dan untuk melakukan perubahan ASEAN menjadi suatu daerah perdagangan yang lebih bebas barang, Investasi, Tenaga Kerja Terampil, Jasa dan aliran modal yang lebih bebas lagi.

Isi dari deklarasi Bangkok tersebut adalah :

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional
3. Meningkatkan kerja sama saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial politik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
4. Memelihara kerja sama yang erat ditengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada
5. Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di Kawasan Asia Tenggara

Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok tersebut, suatu organisasi kawasan yang diberi nama perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Nations/ASEAN*) telah resmi berdiri. Pada awalnya organisasi ini berdiri untuk mrnggalang kerjasama antar negara anggota dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian dan stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang kepentingan bersama.⁹

⁸ *Ibid* hlm.19

⁹

<http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/pages/sejaraFteorih-dan-latar-pembentukan-ASEAN.aspx> Diakses pada Tanggal 3 Desember 2019 pada pukul 18.30

Negara dibenua Asia cukup mengalami perkembangan yang dinamis dimana setiap negara melakukan kerjasama diberbagai bidang sehingga terbentuklah MEA. MEA kepanjangan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN atau dengan bahasa asing *ASEAN Economics Community* adalah sebuah bentuk pasar Tunggal dengan adanya sistem perdagangan bebas antara negara-negara se-ASEAN yang telah disepakati sebelumnya.

MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN ialah suatu realisasi dari tujuan Akhir terhadap integrasi ekonomi yang telah dianut didalam ASEAN visi 2020 yang berdasarkan atas konvergensi kepentingan para negara-negara anggota ASEAN untuk dapat memperluas dan memperdalam integrasi ekonomi lewat inisiatif yang ada dan baru dengan memiliki batas waktu yang jelas, didalam mendirikan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, ASEAN mesti melakukan tindakan sesuai dengan pada prinsip-prinsip terbuka, berorientasi untuk mengarah ke luar, terbuka, dan mengarah pada pasar ekonomi yang teguh pendirian dengan peraturan multilateral serta patuh terhadap sistem untuk pelaksanaan dan kepatuhan komitmen ekonomi yang efektif berdasarka aturan.

MEA akan mulai membentuk ASEANmenjadi pasar dan basis dari produksi tunggal yang dapat membuat ASEAN terlihat dinamis dan dapat bersaing dengan adanya mekanisme dan langkah-langkah dalam memperkuat pelaksanaan baru yang berinisiatif ekonomi, memepcepat perpaduan regional yang ada disektor-sektor prioritas, memberikan fasilitas terhadap gerakan bisnis, tenaga kerja, memiliki bakat dan terampil, dapat memperkuat kelembagaan mekanisme di ASEAN.¹⁰

Menjadi langkah awal dalam mewujudkan MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN disaat yang sama, MEA akan dapat mengatasi kesenjangan pada pembangunan dan melakukan percepatan integrasi kepada negara Laos, Mnyanmar, Vietnam, dan Kamboja lewat lewat Initiative for ASEAN integration dan inisiatif dari regional lainnya.

Adapun bentuk kerjasamanya ialah :

¹⁰ Tando aveline anggrippina.2014."MEA 2015 ajang kompetisi kualitas tenaga kerja"

1. Pengembangan pada sumber daya manusia dan adanya peningkatan kapasitas.
2. Pengakuan terkait kualifikasi profesional
3. Konsultasi yang lebih dekat terhadap kebijakan makro keuangan dan ekonomi.
4. Memiliki langkah-langkah dalam pembiayaan perdagangan
5. Meningkatkan infrastruktur
6. Melakukan pengembangan pada transaksi elektronik lewat e-ASEAN
7. Memperpadukan segala industri yang ada diseluruh wilayah untuk dapat mempromosikan sumber daerah
8. Meningkatkan peran dari sektor swasta untuk dapat membangun MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.¹¹

Rendahnya sumber daya manusia Indonesia menyebabkan kondisi tenaga kerja mengalami berbagai masalah yang cukup serius dan membutuhkan peran pemerintah yang efektif untuk menanggulangi guna mencapai sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi untuk menghadapi persaingan global terlebih dalam persaingan MEA.

pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan dalam menjalankan kehidupan bernegara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bersama-sama melakukan pengaturan sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diberikan pada masing-masing. Dalam kehidupan bernegara, untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta melaksanakan amanat Undang-Undang Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan atau mengeluarkan suatu pengaturan baik berupa undang-undang, peraturan hingga kebijakan sesuai dengan porsi kewenangannya.¹²

¹¹ *Ibid* Hlm.23

¹² Rowland B.F. Pasaribu, Dampak Globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, <https://rowlandpasaribu.files.wordpress.com> (diakses tanggal 13 September 2014).

strategis yang dapat dilaksanakan pemerintah dalam jangka waktu menengah antara lain :

a. Pemerintah mengoptimalkan penyusunan Roadmap kebijakan nasional yang terpadu dan terkoordinir serta disusun berdasarkan keadaan dan kebutuhan masyarakat melalui kementerian terkait selaku wakil dari negara untuk menghadapi AEC.

b. Pemerintah harus melakukan penyusunan kebijakan untuk edukasi serta sosialisasi terkait ASEAN Community kepada masyarakat secara keseluruhan, sehingga tercipta masyarakat yang berpengetahuan dan berkesadaran.¹³

pemerintah ini juga akan ditopang secara kelembagaan dengan akan dibentuknya Komite Nasional yang terdiri dari perwakilan pemerintah pusat dan daerah, Menteri, Gubernur, dunia usaha, pengamat dan masyarakat untuk mempersiapkan seluruh elemen bangsa dalam menyambut Komunitas Ekonomi ASEAN.

negara-negara Asia Tenggara dan membentuk kerjasama regional yang lebih kokoh, lima Menteri Luar Negeri yang berasal dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand mengadakan pertemuan di Bangkok pada bulan Agustus 1967 yang kemudian dikenal sebagai Deklarasi Bangkok, menghasilkan rancangan Joint Declaration yang pada intinya mengatur tentang kerjasama regional di kawasan tersebut.

Sebagai puncak dari pertemuan tersebut, maka pada tanggal 8 Agustus 1967 ditandatangani Deklarasi ASEAN atau dikenal sebagai Deklarasi Bangkok tersebut oleh Waki Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Malaysia dan para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Filipina, Singapura danThailan. Brunei Darussalam kemudian bergabung pada tanggal 8 januari 1984, Vietnam tanggal 28 juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 Juli 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 April 1999.¹⁴

Pembentukan MEA berawal dari kesepakatan para pemimpin ASEAN dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada Desember

¹³ Dodi Mantra hegemoni dan diskursusNeoliberalisme: Op.Cit. hlm. 99

¹⁴ Kerja Sama Antarnegara ASEAN dalam MEA via rumahcitakita.org

1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Kesepakatan ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN, serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN, meningkatkan daya saing ASEAN serta bisa menyaingi Tiongkok dan India untuk menarik investasi asing.

Modal asing dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan warga ASEAN. ASEAN meluncurkan inisiatif pembentukan integrasi kawasan ASEAN atau komunitas masyarakat ASEAN melalui ASEAN Vision 2020 saat berlangsungnya ASEAN Second Informal Summit. Manfaat Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi Indonesia

karakteristik utama MEA adalah pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, kawasan dengan pembangunan ekonomi yang adil dan kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Dampak terciptanya MEA adalah terciptanya pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja. Konsekuensi atas kesepakatan MEA yakni dampak aliran bebas barang bagi negara-negara ASEAN, dampak arus bebas jasa, dampak arus bebas investasi, dampak arus tenaga kerja terampil, dan dampak arus bebas modal.¹⁵

MEA diawali dari perjanjian bersama pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia yang menghasilkan satu visi bersama negara-negara Asia Tenggara (*ASEAN Vision 2020*). Tujuannya menjadikan kawasan Asia Tenggara sebagai kawasan yang makmur dengan pembangunan serta pengembangan ekonomi yang merata di tiap-tiap negara yang menjadi anggotanya. KTT di Bali, Indonesia pada Oktober 2003 menelurkan hasil yang hampir sama dengan KTT 1997. Pada KTT di Bali tersebut, para pemimpin negara-negara ASEAN menyatakan pentingnya mengintegrasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai satu tujuan utama dalam integrasi perilaku ekonomi di kawasan regional yang akan diterapkan tahun 2020.

KTT selanjutnya pada 2006 di Kuala Lumpur, Malaysia melahirkan konsensus baru. Isinya menyatakan bahwa tahun diberlakukannya

MEA dimajukan. Yang awalnya tahun 2020 menjadi tahun 2015. Konsensus tersebut melahirkan deklarasi yang disebut dengan Deklarasi Cebu. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Cebu maka keputusan konsensus dari tahun ke tahun menjadi satu langkah nyata untuk menjadikan ASEAN sebagai daerah perdagangan bebas yang meliputi seluruh komponen aktivitas ekonomi. Mulai dari barang, tenaga kerja (terampil), investasi, modal, sampai jasa.

Adapun tujuan dari MEA Seperti yang dijelaskan sebelumnya, pembentukan MEA memiliki tujuan utama menghadirkan pemerataan ekonomi bagi seluruh warga masyarakat kawasan ASEAN. Jika diuraikan dengan lebih mendalam berdasarkan Deklarasi Cebu.

tujuan utama dari dibentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), yaitu:

1. Menciptakan pasar tunggal yang mencakup negara-negara ASEAN sekaligus pusat produksi (*production base*) dengan kaitannya pada elemen produk aktivitas ekonomi bebas, seperti tenaga kerja (terdidik/terampil), bebas bea untuk aliran barang dan jasa dari kawasan regional ASEAN, serta keluar masuknya investasi dan aliran modal untuk negara-negara sekawasan.
2. Menjadikan ASEAN sebagai kawasan berdaya saing ekonomi tinggi yang ditandai dengan dikuatkannya peraturan dalam kompetisi ekonomi, meliputi perlindungan konsumen, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), perpajakan, kelancaran aktivitas *e-Commerce*, dan pengembangan infrastruktur.
3. Meratakan pemberdayaan ekonomi kawasan ASEAN dengan sasaran utama revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM), terutama bagi negara Kamboja, Myanmar, Laos, dan Vietnam (CMLV). Sebagaimana diketahui bersama negara CMLV telah lama dan berulang kali didera dengan beragam masalah politik, sosial,

¹⁵ Kerjasama antar negara ASEAN dalam MEA via rumahcitakita.org

dan kebudayaan yang berpengaruh terhadap keamanan negara tersebut. Dengan demikian, sebagaimana terangkum dalam *ASEAN Vision 2020* serta *Pakta ASEAN Concord II*, MEA dibuat dengan maksud untuk pemerataan ekonomi hingga ke seluruh penjuru kawasan.

4. Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global dengan tujuan dasar untuk meningkatkan peran serta ASEAN dalam percaturan kebijakan global. Semua dilakukan dengan proses pendekatan yang koheren antara ekonomi regional dan global. Hal ini tentu adalah salah satu sisi positif sebab nantinya masukan negara-negara ASEAN dianggap penting.

Tujuan dari pembentukan MEA sesuai dengan pakta dalam Deklarasi Cebu tersebut tentu memberikan corak baru bagi ciri ekonomi di kawasan MEA. Ciri tersebut bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Iklim ekonomi kawasan menjadi lebih kompetitif.
2. Usaha untuk pemerataan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.
3. Integrasi ekonomi global dan pelosok untuk menjadi basis produksi serta pasar tunggal.

Lima Hal Ini Membantu untuk Mempersiapkan Diri Menghadapi MEA yakni :

1. MEA Bukanlah Hal Baru dalam lingkup ASEAN

Berdasarkan sejarahnya, kebijakan ASEAN untuk bersatu dalam mewujudkan perdagangan bebas MEA bukanlah hal baru. Setidaknya, semua sudah terencana selama kurang lebih satu dekade belakangan.

Percepatan yang dilakukan (semula 2020 dimajukan menjadi 2015) adalah sikap yang wajar, mengingat perkembangan ekonomi dunia yang fluktuatif. Mengenali dan memahami gejolak-gejolak internasional adalah satu cara untuk memanfaatkan keuntungan dari MEA dan menghindari kerugian yang tak diinginkan.

2. MEA Memberi Banyak Keuntungan yang Bisa Didapat Seorang Individu

Salah satu tujuan MEA adalah mengusahakan pemerataan dan menurunkan ketimpangan dalam masyarakat ASEAN. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya tentang memajukan UKM di negara-negara CMLV. MEA akan menjadikan ASEAN sebagai pasar atau produsen dari beragam produk negara-negara anggota. Semakin dimudahkan penjualan secara global maka semakin besar pasar sehingga menjadi peluang bagi siapa saja yang peka dan kreatif.

3. Produktivitas dan **Cross Market**

Pasar memiliki tingkat kejenuhannya sendiri. Dengan MEA, pasar yang terbuka semakin luas demikian pula dengan kompetisi. Yang harus menjadi fokus tentu saja adalah bagaimana masuk ke pasar negara lain. Semakin tinggi daya saing (karena kualitas) membuat produsen lebih kreatif dan inovatif serta berkualitas dalam menciptakan produk. Produsen di Indonesia yang ingin agar produknya bisa diterima dalam pasar global mau tak mau memerhatikan kualitas produknya, minimal memenuhi standar internasional.

4. Kesadaran Akan Peningkatan Mutu Pendidikan SDM

Data dari 2014 menunjukkan jumlah pekerja berpendidikan sekolah menengah pertama (SMP) di Indonesia sekitar 76,4 juta jiwa. Jumlah tersebut jika dipersenkan sekitar 64% dari 118 juta jiwa pekerja Indonesia. Angka yang termasuk tinggi untuk indikator rendahnya mutu sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki. Setiap individu yang sadar dengan persaingan MEA tentu akan terus menggenjot mutu dan tingkat pendidikan sampai level tinggi atau tertinggi.

5. Kesadaran Akan Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Pendukung

Negara dapat berkembang menuju level yang signifikan dengan mendorong pembangunan di bidang sarana dan prasarana. Dibukanya MEA juga mengisyaratkan hal yang sama. Tentu butuh peran serta semua pihak agar sarana dan prasarana di Indonesia terus berkembang menuju taraf yang lebih memadai.¹⁶

¹⁶ <https://www.cermati.com/artikel/masyarakat-ekonomi-asean-mea->

Regulasi pemerintah memiliki peran sebagai pedoman atau arahan pada masyarakat untuk mencapai suatu keadaan yang ingin dicapai, Ubi societatis, yang artinya dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Pemerintah harus segera menetapkan regulasi agar masyarakat dapat turut serta dalam upaya negara mencapai tujuan yang diharapkan¹⁷

B. Dampak Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mea Di Indonesia

Dampak yang mempengaruhi pelaksanaan MEA dapat dilihat dari 2 sisi yang itu :

1. Dampak Positif

Dilihat dari Tujuan banyak memberikan dampak Positif bagi Negara atau Masyarakat. Adapun dampak positifnya yaitu :

a) Aspek perdagangan

Berkaitan dengan pasar bebas dikawasan Asia Tenggara sehingga memberikan dampak menonjol dan mempengaruhi kegiatan perdagangan. Dengan adanya MEA hambatan apa pun mengenai perdagangan sangat berkurang bahkan hampir tidak ada. Maka dari itu ini akan memberikan dampak kepada kegiatan perdagangan internasional terutama kawasan asia tenggara, seperti peningkatan ekspor, peningkatan produksi secara kuantitas atau pun kualitas, menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Negara ASEAN peningkatan devisa Negara melalui bea masuk barang.

b) Aspek investasi

Peningkatan akan masuknya investasi asing yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dengan perkembangan teknologi, sumber daya manusia, lapangan kerja, dan akses pasar dunia yang mudah. Untuk investor terutama pada sektor ekonomi dan pengembangan usaha maupun perusahaan dalam negeri. Dari dampak ini meningkatkan investasi seperti mempelebar peluang wirausaha, peningkatan relasi bisnis yang terbuka, memberikan kesempatan

untuk investor dan investor kecil atau pun besar dan memberi peluang untuk pemula ekonomi investasi.

c) Bidang Ketenagakerjaan

Adanya peningkatan lapangan kerja dan kesempatan kerja bagi masyarakat, mudahnya akses mencari pekerjaan di luar negeri kawasan Asia Tenggara, untuk pengusaha dapat mempermudah mencari pekerja yang sesuai kriteria dan kemampuan. Dampak ini dapat memberikan peningkatan kualitas keterampilan masyarakat, mendorong masyarakat agar berpikir terbuka akan perubahan sosial budaya karena adanya pasar terbuka, dan meningkatkan persaingan sehat atau pekerja.

2. Dampak negatif MEA

a) Eksploitasi yang dilakukan perusahaan

Asing terhadap SDA di Negara Indonesia

b) Produk luar negeri bebas masuk ke Negara Indonesia

c) Harga produk Impor lebih murah dari pada harga pedagang sejenis

d) Masyarakat lebih konsumtif terhadap barang luar negeri.¹⁸

Dari sisi positifnya, MEA akan menjadi kesempatan baik bagi Indonesia, karena hambatan perdagangan baik itu barang maupun jasa akan cenderung berkurang dan bahkan menjadi tidak ada.

Hal tersebut tentu berdampak pada peningkatan ekspor Indonesia. Dari aspek ketenagakerjaan, terdapat kesempatan yang sangat besar bagi para pencari kerja, karena banyaknya lapangan kerja yang tersedia dengan berbagai kebutuhan dan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, tenaga terampil di Indonesia akan lebih terserap di luar negeri mengingat selama ini dalam kenyataannya hanya mempunyai sedikit peluang, misalnya sektor kreatif.

Sisi negatifnya, tentu memunculkan persaingan tenaga kerja Indonesia dengan TKA yang berasal dari negara ASEAN. Ada 8 (delapan) profesi yang telah disepakati oleh negara ASEAN dalam pasar bebas MEA, kedelapan profesi yang dimaksud tertuang dalam ASEAN Mutual Recognition Arrangement (MRA) diantaranya yaitu: Insinyur, Arsitek,

¹⁷ Komunitas ASEAN 2015, www.setneg.go.id/index.php?option (diakses 10 September 2014).

¹⁸ *Ibid* Hlm.38

Perawat, Tenaga Survei, Tenaga Pariwisata, Praktisi Medis, Dokter Gigi dan Akuntan.¹⁹

Indonesia termasuk dalam wilayah ASEAN yang mengalami beberapa perubahan dengan negara-negara lain yakni perubahan dibidang politik, ekonomi, pendidikan, sosio-budaya dan teknologi.²⁰

Daya saing tenaga kerja di Indonesiadinilai dapat menghambat keberhasilan Indonesia dalam memanfaatkan MEA. Kualitas keahlian sumber daya manusia dan tingkat pendidikan belum memadai. Lemahnya tingkat pendidikan tenaga kerja, tentunya juga mempengaruhi daya saing Indonesia.

Untuk itu pemerintah harus menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi MEA, baik itu dengan cara diadakannya pelatihan keterampilan tenaga kerja dalam kecerdasan sikap, kemampuan berbahasa Inggris dan kemahiran dalam pengoperasian komputer. Meskipun peran dominan dalam meningkatkan kualitas menjadi milik pemerintah, bukan berarti seluruh tanggung jawab berada di tangan pemerintah. Justru sebaliknya perlu kesadaran bahwa efek dari MEA akan dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Secara Nasional, dampak dari MEA juga akan dirasakan langsung di daerah-daerah yang menjadi sasaran favorit bagi TKA. Untuk itu, masing-masing daerah harus siap dansigap dalam menghadapi serbuan TKA dengan cara membentuk Peraturan Daerah (Perda) atau peraturan lainnya tentang pengawasan TKA dimasing-masing daerah, sehingga masing-masing daerah mampu mengantisipasi dampak dari MEA ini.

secara yuridis, perlindungan terhadap tenaga kerja juga diatur di dalam Pasal 67-101 UU Ketenagakerjaan diantaranya yaitu: perlindungan, pengupahandan kesejahteraan.

Indonesia telah memasuki arus Masyarakat Ekonomi ASEAN maka perlindungan terhadap tenaga kerja harus ditingkatkan.

Ada bebarapa Perubahan sosial budaya pada pelaksanaan MEA yakni :

1. Cara Berkomunikasi

Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi merubah cara kita dalam berkomunikasi dulu komunikasi dilakukan dengan suratmenyurat dan tetapi saat ini dilakuan dengan sms atau emaildulujuga ada yang namanya telegram dan telegraf dan akan tetapi saat ini perannya digantikan dengan telepon dan handphonedan jejaringosiasiini membuktikan bahwa perkembangan teknologi dapat menyebabkan perubahan budaya dimasyarakat.

2. Cara berpakaian

Cara masyarakat kita berpakaian tidak lepas dari globalisasi dan modernisasi di Indonesiadulu dan orang-orang kita bangga mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing Tetapi dan saat ini rasanya hal itu sangat sulit dijumpai kecuali kalau ada acara-acara adat. cara berpakaian dipengaruhi dari informasi-informasi yang didapatkan dari berbagai media seperti tv dan internetsaat ini dan cara berpakaian sebagian masyarakat banyak dipengaruhi oleh budaya barat.

3. Gaya Hidup

Salah satu perubahan sosial budaya yang terjadi didalam masyarakat indonesia adalah gaya hidup akan *lifestyle* sebagian masyarakat menerapkan gaya hidup yang baik dalam kehidupannya seperti menjadi vegatarian dan workholic dan dll. Tetapi ada juga sebagian besar masyarakat yang terjerumus kedalam *lifestyle* yang tidak baik yang tentu tidak sesuai dengan kepribadian bangsa indonesia seperti narkoba dan pergaulan bebas.

4. Westerniasi (keberat-baratan)

Tidak sedikit budaya yang masuk ke indonesia dan contohnya dalah perayaan hati valentine dan halloween meskipun kedua budaya tersebut bukan budaya asli indonesia dan akan tetapi tidak sedikit masyarkat indonesia yang melestarikan budaya tersebut banyak masyarakat indonesia yang menyatakan bahwa budaya asing jauh lebih menarik ketimbang budaya kita sendiri dan hal ini yang menyebabkan intersert kepada budaya lokal semakin menurun.

¹⁹ Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Keselamatan dan Keselamatan Kerja, Jakarta, Djambatan, 1995, hlm. 15.

²⁰ Rusli Ghalib, Ekonomi Regional, Bandung Pustaka Ramadhan, 2011, hlm 14

5. Emansipasi Wanita

Indonesia adalah salah satu bentuk perubahan sosial budaya yang terjadi dimasyarakat indonesia adalah emansipasi wanita dan artinya wanita memiliki derajat yang sama dengan pria. Dulu kita jarang sekali melihat wanita yang menjadi pimpinan dan bahkan ada kalimat orang tua yang menyatakan bahwa kehidupan wanita adalah disekitar dapur dan sumur dan kasur. Saat ini tentu berbeda dan banyak wanita yang menjabat peran penting dinegeri ini seperti anggota parlemen, dan pimpinan perusahaan.

6. Masyarakat Semakin Kritis

Perkembangan informasi dan komunikasi membuat akses terhadap informasi semakin mudah. Informasi tersebut bisa didapatkan dari berbagai media komunikasi dan seperti koran dan televisi dan internet dll. Hal tersebut membuat masyarakat kita semakin cerdas dan kritis dan contohnya adalah masyarakat selalu mengomentari kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk negeri ini dan terlebih jika kebijakan tersebut tidak populis dimata rakyat.

7. Hilangnya Permainan Tradisional

Saat ini kita akan sulit untuk menemukan permainan tradisional seperti gasing atau congklak. Permainan ini sangat populer pada masa dan merupakan permainan asli indonesia. Sekarang perannya sudah diganti dengan permainan modern seperti playstation dan will. Nampaknya permainan modern jauh lebih menarik ketimbang permainan tradisional.

8. Pudarnya Minat Kepada Alat-alat Musik Tradisional

Minat masyarakat alat-alat musik tradisional seperti angklung dan gamelan dll. Semakin berkurang walaupun ada itu hanya sebagian kecil masyarakat yang peduli dan tergerak hatinya untuk melestarikan alat-alat musik tradisional sekarang banyak masyarakat yang cenderung menyukai alat-alat musik modern seperti gitar, pinao, drum, dll.

9. Tergerusnya Kebudayaan Indonesia

Bentuk lain perubahan sosial budaya di indonesia adalah tergerusnya budaya asli indonesia. Sedikit dari kebudayaan kita ini sudah mulai punah, meskipun demikian banyak masyarakat indonesia yang lebih berminat dengan budaya asing yang masuk ke indonesia seperti break dance, beat boc dan lainnya.

10. Penggunaan Bahasa Daerah Semakin Jarang

Contoh perubahan sosial budaya lainnya adalah penggunaan bahasa daerah yang sudah semakin jarang kita ketahui bersama ada banyak bahasa daerah di indonesia ini (lebih dari 100 bahasa daerah) akan tetapi saat ini banyak masyarakat yang cenderung menggunakan bahasa indonesia. Hal ini bukan tanpa alasan dan karena bahasa indonesia dimengerti oleh semua, sedangkan bahasa daerah lainnya hanya dimengerti oleh masyarakat daerah tertentu saja.

Perubahan budaya sebenarnya lebih mengacu pada sebuah perubahan dalam proses tata sosial dalam masyarakat. Beberapa perubahan budaya ini termasuk juga perubahan dalam lingkungan, lembaga, perilaku dan juga hubungan sosial. Selain itu, perubahan budaya juga bisa mengacu pada gagasan untuk sebuah kemajuan sosial dan juga evolusi sosial dan budaya.

Perubahan budaya sendiri biasanya dapat berlangsung dengan sangat cepat atau pun lambat dan umumnya sangat tidak bisa disadari oleh masyarakat dalam sebuah negara. Karena hanya beberapa orang yang mengetahuinya ketika orang tersebut mulai membandingkan kehidupan sosial di masa lalu dan masa saat ini.

Masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) adalah realisasi pasar bebas di Asia Tenggara yang telah dilakukan secara bertahap mulai KTT ASEAN di singapura pada Tahun 1992 tujuan dibentuknya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN serta diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah dibidang ekonomi antar negara ASEAN. Konsekuensi atas kesepakatan MEA tersebut berupa aliran bebas barang bagi Negara-negara ASEAN. Dampak arus tenaga kerja terampil dan dampak arus bebas modal tersebut tentunya dapat berakibat

postif atau negatif bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu dari sisi pemerintah juga dilakukan strategi dan langkah-langkah agar Indonesia siap dan dapat memanfaatkan MEA.²¹

Beberapa aturan MEA dalam menghadapi globalisasi ekonomi yang pada hakikatnya berkaitan dengan pembuatan hukum, baik dilakukan antar pribadi, antar perusahaan, dan antar negara. Reformasi dibidang hukum di Indonesia dengan menitik beratkan terorganisasi dan terstrukturisasi hukum yang profesional dan aspirasi terhadap kebutuhan hukum nasional. Kebutuhan hukum tersebut semakin terasa dalam mrenghadapi globalisasi ekonomi.

Adapun macam-macam aturan Dasar (Fundamental) hukum ekonomi anatara lain:

1. Kaidah Dasar Minimum (Minimum Standards)
Kaidah ini menyatakan bahwa kewajiban negara untuk sedikitnya memberikan jaminan perlindungan kepada pedagang atau pengusaha asing dan harta miliknya.
2. Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan Sama (*Identical Treatment*)
Menurut Schwarzenberger, kaidah ini tampak dalam hukum kekebalan diplomatik yang juga menganut prinsip timbal balik. Dalam hal ini pemberian perlakuan yang sama yang sifatnya timbal balik berada sepenuhnya kepada wewenang atau kebijaksanaan para pengusaha kedua negara.
3. Kaidah Dasar Mengenai Perlakuan Nasional (*National Treatment*)
Kaidah perlakuan nasional disebut juga sebagai klausul perlakuan nasional merupakan salah satu pengejawantahan dari prinsip non-diskriminasi. Klausul ini ditemukan dalam berbagai perjanjian termasuk dalam GATT dan perjanjian-perjanjian persahabatan, perdagangan, dan navigasi.²²
4. Kaidah Dasar Mengenai Klausul atau Kewajiban (*most-favoured-nation(MFN)*)
Klausul ini terdapat pula dalam GATT (khususnya mengenai perdagangan barang) dan dalam perjanjian-perjanjian

internasional lainnya yang sifatnya umum. Klausul MFN ini adalah prinsip non-diskriminasi diantara negara-negara.

5. Kaidah Dasar Mengenai Kewajiban Menahan Diri Untuk Tidak Merugikan Negara Lain
Tampak pada pasal (3) Ayat (1) GATT pasal ini menyatakan bahwa suatu tindakan tertentu tidak boleh diterapkan sehingga memberikan proteksi kepada produksi dalam negeri.
6. Kaidah Dasar Mengenai Prefensi Negara Sedang Berkembang
Maksudnya adalah kaidah yang mensyaratkan perlunya suatu kelonggaran-kelonggaran atas aturan-aturan hukum (kaidah dasar) tertentu bagi negara-negara sedang berkembang. Artinya negara-negara ini perlu mendapat perlakuan khusus manakala negara-negara maju berhubungan dengan mereka.
7. Kaidah Dasar Mengenai Penyesalian Sengketa Secara Damai
Dalam penyelesaian sengketa atau masalah ekonomi yang jarang sekali para pihak menyerahkannya kepada lembaga penyelesaian sengketa Internasionalnya, meskipun lembaga tersebut cukup memiliki reputasi baik. Contoh dalam seperti Mahkamah Internasional.
8. Kaidah Dasar Kedaulatan Negara Atas Kekayaan Alam, Kemakmuran, Dan Kehidupan Ekonominya
Hukum ekonomi harus membuat serangkaian ketentuan, termasuk didalamnya lembaga-lembaga, praktek, metode dan prinsip-prinsip yang mengatur dan menjamin perlindungan efektif terhadap kekayaan alam, khususnya kekayaan alam negara sedang berkembang.
9. Kaidah Dasar Kerja Sama Internasioanal
Kaidah dasar ini adalah Tanggung jawab kolektif (*Collective responbiloty*) dan solidaritas untuk pembangunan dan kesejahteraan bagi semua negara. Kewajiban hukum untuk bekerjasama ini mencakup semua bidang ekonomi Internasional.²³

²¹ http://id.wikipedia.org/wiki/perubahan_sosial_budaya

²² Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional suatu pengantar cetakan ke 3

²³ Huala Adolf, Hukum Ekonomi Internasional suatu pengantar cetakan ke 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan pelaksanaan masyarakat Ekonomi ASEAN dari sisi perdagangan dapat dilandaskan dengan Landasan Moral atau kemanusiaan sebagai dasar mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia .
2. Dampak yang mempengaruhi Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia dilihat dari dua sisi yakni sisi positif dan sisi negatif. Dimana dampak positif tersebut dapat memberikan dampak kepada aspek perdagangan, aspek Investasi dan aspek ketenagakerjaan. Dan dampak disisi negatif juga dapat mempengaruhi Eksploitasi SDA di Negara Indonesia, bebasnya produk luar memasuki kawasan Negara Indonesia dan Masyarakat lebih kondusif dengan barang luar negeri

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih lagi menegakkan peraturan, terutama yang berkaitan dengan perdagangan di lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN karena dari sisi perdagangan dapat lihat bahwa pemerintah lebih mementing pertumbuhan ekonomi dibandingkan hasilnya, yang dapat menimbulkan kecenderungan dalam menghadapi globalisasi.
2. Sebaiknya pemerintah harus mencegah dampak negatif yang dapat mengganggu sumber daya alam yang ada di indonesia, dan harus mencegah bebas masuknya produk luar negeri ke indonesia yang dapat mengakibatkan masyarakat lebih kondusif terhadap barang luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Dasar Neagara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke 4

Imam Soepomo, Hukum Perburuhan Bidang Keselamatan dan KeselamatanKerja,Jakarta, Djambatan, 1995,

Departemen Luar NegeriRepublik Indonesia (DEPLU RI), ASEAN SelayangPandang, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta, 2010, hlm 2.

Ibid hlm.2

Ade Maman suherman, Organisasi Internasional dan Integrasi ekonomi regional dalam presfektif hukum dan globalisasi, Jakarta : Ghalia Indonesia,2003,hlm.147.

Piagam ASEAN, <www.kemlu.go.id> [diakses pada 14 / 04 / 2017]

Materi Kemendagri mengenai Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan tema” Menjadi pemenang pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Tando aveline anggrippina. 2014. “MEA 2015 ajang kompetisi kualitas tenaga kerja.”